KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Beda Data soal Angka Kemiskinan
Tanggal : Selasa, 18 Desember 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Beda Data soal Angka Kemiskinan

JAKARTA-DPR RI mengeluarkan data soal angka kemiskinan di Indonesia sejak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun, jumlah angka dan prosentasinya berbeda satu sama lain.

Anggota Komisi XI DPR RI, Sjarifuddin Hasan mengatakan, angka kemiskinan hanya turun 1,1 persen di pemerintahan Jokowi-JK. Kemudian, pengangguran hanya turun 0,5 persen. "Supaya kemiskinan turun lebih banyak, pengangguran turun banyak, yang bisa lakukan perubahan ya Prabowo-Sandiaga," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/12).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku, korupsi semakin meningkat di era pemerintahan saat ini. Menurutnya, meningkatnya korupsi itu karena pemberantasannya tajam ke bawah, tumpul ke atas. "Yang bisa membalikkan itu adalah Prabowo-Sandi. Terakhir yang ingin saya sampaikan, pembangunan saat ini hanya fokus infrastruktur. Yang terjadi sekarang SDM kita tertinggal, untuk melakukan perubahan itu pembangunan harus seimbang," ucapnya.

Sjarif pun mengingatkan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus diutamakan. "Yang bisa melakukan itu adalah Prabowo-Sandi," ucapnya.

Di samping itu, dia pun menjelaskan alasan lain Partai Demokrat mendukung Pasangan Prabowo-Sandiaga, yakni karena ekonomi nasional tidak beranjak dari 5 persen. "Itulah yang menyebabkan rakyat kita semakin miskin, semakin susah. Untuk itu harus ada perubahan. Dan yang bisa melakukan perubahan itu Prabowo-Sandiaga," imbuhnya.

Sementara, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menilai, penurunan angka kemiskinan yang dicapai pemerintahan Jokowi-JK dari dua digit menjadi satu digit dalam setahun terakhir merupakan rekor baru yang patut diapresiasi.

"Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik, red), angka kemiskinan di Indonesia turun dari angka 10,12 persen pada Maret 2017 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Angka ini merupakan rekor baru dan untuk pertama kalinya menjadi satu digit sejak krisis moneter tahun 1998," ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, pemerintah harus terus menekan angka kemiskinan, termasuk dengan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, karena naiknya harga komoditas utama seperti beras, terigu, gula, daging sapi, telur dan daging ayam dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Bamsoet juga mendorong para Menteri Kabinet Kerja terus menggencarkan program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah melalui pemerataan pembangunan. "Salah satu faktor masih tingginya angka kemiskinan adalah belum merata-nya pembangunan terutama di Indonesia bagian timur," tuturnya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan, khususnya di perdesaan, karena pemerintah telah menganggarkan dana desa yang besar untuk pembangunan fisik di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (aen)